

**ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH  
PERBANDINGAN RASIO UTANG ATAU PINJAMAN LUAR NEGERI  
TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
TAHUN 2005--2012, DENGAN  
MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2015—2022**

**Muhamad Syamsul Ma'arif<sup>1</sup>, Tubagus Rifqy Thantawi<sup>2</sup>, Susi Melinasari<sup>3</sup>.**

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
<sup>1</sup>aculmaarif12@gmail.com, <sup>2</sup>susimelinasari@febi-inais.ac.id, <sup>3</sup>trifqythan@febi-inais.ac.id.

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the comparison of debt to gross domestic product of the Republic of Indonesia during the 2005-2012 administration of Susilo Bambang Yudhoyono, with the 2015-2022 administration period of Joko Widodo. The variables studied consist of two variables, namely the independent variable and the dependent variable. The objects and data in this research are the ratio of foreign debt or loans and gross domestic product of the Republic of Indonesia during the 2005-2012 Susilo Bambang Yudhoyono administration, with the 2015-2022 Joko Widodo administration. This study uses a quantitative approach. Data collection method in the form of official documents from Bank Indonesia (BI), Central Statistics Agency (BPS), and other official documents. Using secondary data, then processed using the IBM Statistical Program for Social Sciences (SPSS) software version 25, with the Independent Sample T-Test data analysis method. The results of this research show that the average value of the Ratio of Debt or Foreign Loans to Gross Domestic Product of the Republic of Indonesia during the Susilo Bambang Yudhoyono Administration in 2005-2012 was higher than during the Joko Widodo Administration in 2015-2022. There is a relationship and difference between the Ratio of Debt or Foreign Loans to the Gross Domestic Product of the Republic of Indonesia during the 2005-2012 Government of Susilo Bambang Yudhoyono, and the 2015-2022 Government of Joko Widodo. In sharia management, debt is permitted with the principle that if the government has difficulty obtaining funds, it must not be beyond its capabilities (ghalabtid dayn), and the State must intend and make a strong effort to pay it and if it owes money to another party within a certain period of time, then it should record it.*

*Keywords: Foreign Debt or Loans, GDP, Sharia Management.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Utang Terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005-2012, dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015-2022. Variabel yang diteliti terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Objek dan data dalam penelitian ini adalah rasio utang atau pinjaman luar negeri dan produk domestik bruto Negara Republik Indonesia masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005-2012, dengan masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam bentuk dokumen resmi dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen resmi lainnya. Menggunakan data sekunder, kemudian diolah menggunakan *Software IBM Statistical Program for Social Sciences* (SPSS) versi 25, dengan metode analisis data *Independent Sample T-Test*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005-2012, lebih tinggi dibanding pada masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015-2022. Terdapat hubungan dan perbedaan Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005-2012, dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015-2022. Dalam manajemen syariah diperbolehkan berutang dengan prinsip jika pemerintah kesulitan mendapatkan dana, tidak boleh di luar kemampuan (*ghalabtid dayn*), dan Negara harus berniat dan berusaha kuat untuk membayarnya serta jika berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya.

Kata-kata Kunci: Utang atau Pinjaman Luar Negeri, PDB, Manajemen Syariah.

### I. PENDAHULUAN.

Pada tahun 2023, perekonomian global menghadapi risiko gabungan dari stagflasi dan krisis utang. Situasi ini dipicu oleh tingginya biaya pendanaan dan arus modal keluar dari pasar negara berkembang yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas. Untuk merespons kondisi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengambil tindakan dengan kebijakan pembiayaan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan dan mengelola risiko utang. Salah satu langkah yang diambil adalah mengoptimalkan sumber pembiayaan dengan memanfaatkan

pinjaman luar negeri yang memiliki biaya lebih rendah, seperti pinjaman dari lembaga bilateral dan multilateral. Namun, Pemerintah juga perlu memperhatikan faktor-faktor risiko terkait utang, seperti risiko pembiayaan kembali, risiko nilai tukar, dan risiko tingkat bunga. Pembayaran bunga utang meningkat akibat peningkatan jumlah utang yang belum diselesaikan, terutama pada utang dalam negeri. Pemerintah berkomitmen untuk mengendalikan beban bunga utang agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjaga

stabilitas keuangan dalam jangka menengah hingga panjang.

Meskipun demikian, Negara Republik Indonesia tetap membutuhkan utang atau pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah berpendapat bahwa utang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang, seperti pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan. Utang juga memiliki peran penting dalam menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pengembangan pasar keuangan. Namun, kebijakan untuk tetap berutang atau melakukan pinjaman luar negeri juga mendapat protes. Adanya risiko yang fatal ketika tidak disertai dengan peningkatan ekspor dan proporsionalitas dalam mengelola utang menjadi perhatian. Perbandingan utang atau pinjaman luar negeri dapat dilakukan dengan mempertimbangkan produk domestik bruto yang dihasilkan pada saat yang bersamaan dengan terjadinya utang atau pinjaman tersebut. Perbandingan ini dapat diselaraskan dengan masa pemerintahan, terutama setelah pemilihan presiden secara langsung sejak tahun 2004. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis manajemen syariah terhadap utang atau pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak dahulu hingga saat ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa masalah utang atau pinjaman luar negeri selalu menjadi “menghantui” kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap bangsa dan negara di dunia ini, tidak terkecuali bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bahwa seringkali ada kekhawatiran mengenai utang atau pinjaman luar negeri yang dialami Republik Indonesia, seyogianya ditelusuri mengenai keadaan utang atau pinjaman luar negeri yang telah terjadi sejak di masa lalu sampai dengan saat ini. Dengan berdasarkan

rumusan masalah tersebut, hipotesis yang diajukan ialah:

1. Hipotesis Pertama:

Ho: Nilai rata-rata Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata rasio tersebut dalam Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

Hi: Nilai rata-rata Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata rasio tersebut dalam Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

2. Hipotesis Kedua:

Ho: Tidak terdapat hubungan antara Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

Hi: Terdapat hubungan antara Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

3. Hipotesis Ketiga:

Ho: Tidak terdapat perbedaan antara Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang

Yudhoyono Tahun 2005—2012, dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

Hi: Terdapat perbedaan antara Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

### II.1. Utang.

Menurut Munawir (2004), istilah "utang" merujuk pada segala kewajiban keuangan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain dan masih belum dilunasi. Utang merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditor. Utang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang (Munawir, 2004).

#### 1. Utang Jangka Pendek.

Utang jangka pendek merujuk pada utang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Utang jangka pendek memiliki dua keunggulan, yaitu fleksibilitas yang tinggi dan biaya yang lebih terjangkau.

#### 2. Utang Jangka Panjang.

Utang dengan jangka waktu pembayaran lebih dari satu tahun yang tidak berasal dari aset lancar adalah yang dimaksud dengan utang jangka panjang. Utang dalam negeri merujuk pada kewajiban negara yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah suatu negara. Ini termasuk surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan mengenai utang pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mencakup kemungkinan utang yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pemerintah pusat dapat memberikan utang tersebut kepada Pemerintah Daerah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Persyaratan pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (4), juga diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kehati-hatian dalam mengendalikan risiko. Pemberi dan penerima PDN harus memenuhi persyaratan khusus. Dalam konteks ini, Pemerintah melakukan negosiasi dengan calon pemberi pinjaman dan calon penerima pinjaman untuk membahas ketentuan dan persyaratan Pinjaman Dalam Negeri, yang hasil perundingannya kemudian diatur dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang atau pinjaman adalah barang yang dipinjam dari orang lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya. Utang luar negeri merujuk pada dana yang diperoleh dari negara lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral. Dana ini dicatat dalam neraca pembayaran dan digunakan untuk investasi, menutup kesenjangan investasi dan kesenjangan valuta asing yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. atau yang disebut juga Pinjaman Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar

kembali dengan persyaratan tertentu. Kewenangan melakukan Pinjaman Luar Negeri ada pada Menteri Keuangan. Pemerintah pusat memiliki berbagai jenis utang, termasuk utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, utang komersial, dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di dalam dan luar negeri. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pinjaman luar negeri termasuk dalam kategori kewajiban jangka panjang. Menurut Siregar dalam Priyanto (2010), utang luar negeri di negara-negara berkembang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yang berbeda:

1. Pinjaman Resmi.

*Official Development Fund (odf)* yaitu pinjaman bersyarat lunak dan resmi. Pinjaman ini diberikan untuk membantu negara-negara berkembang yang disalurkan melalui lembaga keuangan bilateral dari negara yang bersangkutan.

2. Kredit Ekspor.

Kredit ekspor adalah kredit yang membiayai kegiatan penanaman modal dari modal kerja yang diberikan berupa bentuk rupiah atau valuta asing kepada eksportir atau negara pemasok. Kredit ekspor ini diberikan negara pengekspor dengan jaminan tertentu untuk meningkatkan ekspor.

3. Pinjaman Swasta.

Pinjaman swasta merupakan pinjaman yang diperoleh dari lembaga swasta dan bank berdasarkan pertimbangan komersial, yang diberikan untuk mendukung pembangunan negara-negara berkembang. Pinjaman dari sektor swasta juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan ekspor bagi negara-negara industri. Selain itu, pinjaman swasta dapat

berbentuk obligasi yang dibeli oleh beberapa negara maju.

Menurut Sukirno (2002) dalam Harahap (2007), terdapat dua peran utama dari utang luar negeri dalam hal manfaatnya. Pertama, utang luar negeri digunakan untuk mengatasi masalah kekurangan mata uang asing (*foreign exchange gap*). Kedua, utang luar negeri digunakan untuk mengatasi kekurangan tabungan (*saving gap*). Diharapkan bahwa peran tersebut dapat diatasi melalui pengajuan utang luar negeri, yang dikenal sebagai masalah jurang ganda (*the two gaps problem*). Utang luar negeri bagi negara berkembang dibutuhkan sesuai dengan teori pembangunan dan teori pertumbuhan ialah untuk melakukan industrialisasi serta mempercepat laju pertumbuhan. Pembahasan mengenai pinjaman luar negeri dapat dijelaskan dalam kerangka teori bahwa kekurangan pembiayaan untuk investasi swasta terjadi ketika jumlah tabungan yang tersedia lebih kecil daripada jumlah investasi yang dibutuhkan ( $I - S = \text{resource gap}$ ), dan defisit perdagangan disebabkan karena ekspor lebih kecil dari impornya ( $X - M = \text{trade gap}$ ). Selain itu, Prinsip-prinsip pengelolaan utang luar negeri disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah yaitu sebagai berikut:

1. Transparan;
2. Akuntabel;
3. Efisien dan efektif;
4. Kehati-hatian;
5. Tidak disertai ikatan politik; dan
6. Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah adalah untuk:

1. Membiayai defisit APBN;

2. Membiayai kegiatan prioritas kementerian / lembaga;
3. Mengelola portofolio utang;
4. Diterus pinjamkan kepada pemerintahan Daerah;
5. Diterus pinjamkan kepada BUMN; dan atau
6. Dihilangkan kepada Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara utang dan pembangunan, dapat disimpulkan bahwa keduanya saling terkait. Pembangunan membutuhkan pembiayaan yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Di dalam konteks domestik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengelola pembiayaan tersebut. Sementara itu, dalam skala internasional, pengelolaan dapat dilakukan melalui pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri memiliki peran penting sebagai sumber modal dalam upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selain itu, pinjaman juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri dan membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat umum. Selain itu, pinjaman juga digunakan untuk mendukung investasi yang menghasilkan keuntungan.

## II.2. Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam konteks ekonomi pembangunan, istilah ini menggambarkan penggunaan ilmu ekonomi untuk menganalisis masalah dan kebijakan perekonomian di negara-negara yang belum mencapai tingkat maju (*underdeveloped countries*) atau sedang berkembang (*developing countries*). Dalam perspektif ekonomi, pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kebebasan dalam memilih (*increasing the ability and freedom of choice*). Keberhasilan mencapai hal ini menjadi indikator bahwa baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan

dapat meningkatkan utilitas atau kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan modernisasi kelembagaan ekonomi.

Pembangunan ekonomi melibatkan pertumbuhan ekonomi serta perubahan yang terjadi. Tingkat pembangunan ekonomi suatu negara pada suatu tahun tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun, tetapi juga harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi di berbagai aspek. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan yang serupa, yaitu dalam mendorong perkembangan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi melibatkan perubahan-perubahan seperti perubahan struktur, pola kegiatan ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknis.

## II.3. Produk Nasional Bruto (PNB).

Produk nasional bruto adalah bagian konsep *national income*. Perhitungan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengeluaran, yang melibatkan penjumlahan semua pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian. Hal ini mencakup pengeluaran oleh perusahaan untuk investasi, pengeluaran oleh sektor konsumen, pengeluaran oleh pemerintah, dan juga perdagangan luar negeri.

Pengertian lain dari PNB adalah jumlah atau total dari nilai moneter produk maupun jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh masyarakat disebuah negara. . Dalam kata lain, PNB ini memperhitungkan *output* atau produksi yang dikerjakan oleh seluruh masyarakat disebuah negara, baik itu yang beroperasi di dalam negeri ataupun di luar negeri.

#### II.4. Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Imamul Arifin dan Gina Hadi W (2009;11) “Indikator yang dilihat untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu Negara adalah tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB)”. Produk domestik bruto merupakan nilai barang dan jasa akhir selama kurun waktu tertentu dalam suatu perekonomian (Mankiw dalam Fatmawati, 2015). Produk domestik bruto (PDB) adalah total produksi (*output*) yang dihasilkan oleh pemerintah. Menurut McEachern Produk Domestik Bruto (PDB) (2000:146) bahwa produk domestik bruto/GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Produk Domestik Bruto juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. PDB juga merupakan suatu pengukur kemampuan beberapa negara untuk dapat memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun yang diwujudkan oleh faktor-faktor didalam negeri baik milik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing.

PDB digunakan sebagai indikator untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu baik itu atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan. Menurut BPS (2019), Pendapatan Domestik Bruto atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi dan pergeserannya, sedangkan untuk PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Produk domestik bruto dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku atau PDB nominal yaitu nilai barang dan jasa yang didapatkan oleh suatu negara

dalam suatu tahun tertentu dinilai sesuai dengan harga yang ditetapkan pada tahun tersebut. Produk Domestik Bruto atas dasar harga juga dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang didapatkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar pula dan begitu pula sebaliknya.

2. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan atau PDB riil yaitu nilai barang dan jasa yang didapatkan suatu negara dalam suatu tahun tertentu digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun berbeda. PDB riil dapat digunakan untuk menunjukkan jarak pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

#### II.5. Manajemen Syariah.

Manajemen merupakan bahasa Prancis, manajemen yang artinya adalah (seni) dalam melaksanakan dan mengatur. Atau bisa dibilang manajemen memiliki arti mengendalikan. Sedangkan syariah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu syara atau syariat yang dapat diartikan sebagai hukum Islam. Syariah bisa diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang berkaitan erat dengan tauhid atau nilai-nilai keimanan. Dapat disimpulkan bahwa Manajemen syariah adalah ilmu yang mempelajari mengenai tatacara bagaimana cara mengelola, mengatur serta melakukan kegiatan usaha atau bisnis yang terikat dengan norma-norma keimanan dan ketauhidan, jika perilaku setiap orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka dipastikan perilakunya akan terkendali.

Hal penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus memiliki sifat ri'ayah (jiwa kepemimpinan).

Sifat kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Sifat dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai *Khilafah fi al ardh*. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam arti manajemen mengatur segala sesuatu agar dapat dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas sesuai dengan yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

Fungsi manajemen syariah menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pengarahan/Penggerakan), dan *controlling* (pengawasan/pengamatan). Hal ini juga tertulis dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai falsafah umat Islam. Keempat fungsi dasar itu dianggap sangat fundamental dalam setiap manajemen atau yang dikenal dengan POAC. Adapun penjelasan mengenai empat fungsi utama manajemen syariah, yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan). Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep peraturan Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melaksanakan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapat hasil yang optimal serta sesuai dengan syariat Islam.
2. *Organizing* (Pengorganisasian). *Organizing* berasal dari kata *organize* yang memiliki arti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat

oleh hubungan terhadap keseluruhan. George R. Terry berpendapat bahwa pengorganisasian ialah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan suatu hal atau tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Dalam Islam, hal ini telah ditegaskan dalam Q.S as-Shaf ayat 4, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا  
كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ ﴿٤﴾

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”.

3. *Actuating* (Pelaksanaan dan Pengarahan).

*Actuating* yaitu melakukan pergerakan serta memberikan motivasi terhadap bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. Pergerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Serta sesuai dengan keahliannya dan bagiannya sehingga segera melaksanakan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat



perintah serta mengadakan supervise, sehingga meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok. George R. Terry berpendapat bahwa penggerakan ialah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggotanya tersebut. Jadi penggerakan (*actuating*) diartikan sebagai salah satu tindakan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, dalam hal ini sebagai upaya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

4. *Controlling* (Pengawasan).  
Chuck Williams mengatakan bahwa pengawasan merupakan peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*Actuating*), dilapangan sesuai dengan (*Rencana*), yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*Goal*) dari organisasi. Dengan demikian obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalah, penyimpangan, dan cacat serta hal-hal yang bersifat negatif. *Controlling* dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung. Fungsi manajemen tidak dapat berjalan dengan baik dan efisien jika tanpa adanya fungsi pengawasan (*Controlling*). Firman Allah

Subhanahu wa Taála dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran 104).

## II.6. Analisis Perbandingan *Paired Sample T Test*.

Uji *Paired Sample T-Test* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata pada dua sampel yang berpasangan. Kedua sampel tersebut ialah sampel yang sama namun mempunyai dua kelompok data. Uji *Paired Sample T-Test* merupakan tes parametrik, dan karenanya harus mempunyai syarat bahwa data tersebut berdistribusi normal. Uji *Paired Sample T-Test* ini terdiri dari Uji *Paired Samples Statistics*, Uji *Paired Samples Correlations*, dan Uji *Paired Samples Test*.

## II.7. Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil beberapa jurnal ekonomi sebagai rujukan/acuan atau referensi dalam penelitiannya. Penelitian terdahulu ini digunakan untuk acuan dan pembandingan dalam penelitian, sehingga penelitian sebelumnya bisa dikembangkan didalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dipilih sebagai dasar penelitian ini.

Harahap (2007), dengan judul penelitian “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri*

Indonesia” penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square*. Dan hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan PDB, Pengeluaran Dalam Negeri (PDN), Defisit Anggaran (DA), dan Utang Luar Negeri (ULN-1) memberi kontribusi terhadap utang luar negeri (ULN) sebesar 84,4%, variabel pendapatan PDB secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Utang Luar Negeri (ULN) dan Pengeluaran Dalam Negeri (PDN), Defisit Anggaran (DA), dan Utang Luar Negeri tahun sebelumnya (ULN-1) masing-masing mempengaruhi secara positif dan penting terhadap variabel utang luar negeri. Kontribusi variabel terbesar dalam utang luar negeri adalah Pengeluaran Dalam Negeri (PDN).

Rachmadi (2013), mengkaji “*Pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*” studi kasus tahun (2001-2011). Pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan data sekunder berbentuk *time series* dari tahun 2001 sampai 2011 dengan menggunakan data dari perpustakaan, website, jurnal, atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari lembaga atau instansi, seperti Bapan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Teknik analisis data menggunakan Metode Regresi Linier Berganda dengan penggunaan metode analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari sebuah sampel ataupun populasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa utang luar negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. sehingga menimbulkan *multiplier effect* pada perekonomian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena utang luar negeri memberi rangsangan terhadap peningkatan daya produksi dan pembangunan pada sektor infrastruktur yang menunjang sarana prasarana publik sehingga kegiatan ekonomi berjalan dengan

semestinya. Hasil dari penelitian ini juga mendukung kerangka pemikiran aliran keyakinan Keynesian dan berlawanan dengan pendapat neo klasik.

Mahindun Dhiani Melda Harahap (2007), dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Penelitian ini menggunakan data time series 1980-2004. Hasil dari penelitiannya ialah secara simultan pendapatan PDB, PDN, DA, dan utang luar negeri tahun sebelumnya memberikan kontribusi terhadap ULN sebesar 84,4 persen. Secara parsial variabel PDB mempunyai pengaruh negatif terhadap ULN dan pembangunan dalam negeri secara signifikan. Variabel defisit anggaran dan utang luar negeri tahun sebelumnya masing-masing secara positif memperangaruhi terhadap variabel ULN secara signifikan. PDB mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ULN dan hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian dimana PDB memiliki hubungan negatif terhadap ULN. Variabel yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap ULN adalah pengeluaran dalam negeri dimana koefisien pengeluaran dalam negeri sebesar 0,71 menunjukkan bahwa dengan naiknya pengeluaran dalam negeri sebesar 10 persen, akan menaikkan tingkat ULN sebesar 0,71 persen.

Samsubar Saleh (2008), dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman luar negeri serta imbasnya terhadap APBN. Variabel dalam penelitian ini adalah Utang luar negeri, ekspor, nilai tukar, defisit anggaran, PNB, variabel dummy krisis pinjaman 1997. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model (ECM). Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa ada hubungan kointegrasi jangka panjang atau hubungan keseimbangan antara perubahan pinjaman

luar negeri pemerintah Indonesia terhadap variabel makro ekonomi, yakni defisit anggaran, nilai tukar, ekspor, tingkat pertumbuhan GNP, dan variabel dummy krisis pinjaman 1997. Dari hasil estimasi EG-ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek yang berpengaruh secara penting terhadap pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia adalah variabel dummy krisis ekonomi 1997 dan variabel ECT (Error Correction Term) pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan variabel yang lainnya tidak berpengaruh secara penting terhadap pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia selama periode pengamatan. Signifikansi variabel ECT memperkuat adanya hubungan jangka panjang atau terjadi keseimbangan antara variabel independen dan dependen. Signifikansi variabel-variabel ECT juga menunjukkan bahwa model empiris yang digunakan pada penelitian ini memiliki spesifikasi model yang valid sehingga hasil estimasi EG-ECM digunakan untuk melihat pengaruh pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia. Dalam jangka panjang nilai tukar, dummy krisis ekonomi 1997, ekspor dan tingkat GNP berpengaruh secara signifikan terhadap pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia, sedangkan defisit anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia. Posisi utang luar negeri pemerintah saat ini pada level yang cukup tinggi hal ini menjadi beban tersendiri untuk APBN Indonesia, setiap tahunnya APBN sebagian besar di alokasikan untuk membayar bunga pinjaman dan beban pokok yang telah jatuh tempo. Dari hasil perkiraan diketahui besarnya nilai absolut koefisien variabel ECT sebesar 0.416144 dimana sekitar 41% ketidaksesuaian antara nilai aktual utang luar negeri pemerintah Indonesia dalam jangka pendek dan nilai keseimbangan pinjaman luar negeri dalam jangka panjang akan dikoreksi pada setiap tahunnya. Dalam jangka panjang utang luar negeri pemerintah

Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh nilai tukar, dummy krisis ekonomi 1997, ekspor dan tingkat GNP, sedangkan defisit anggaran tidak berpengaruh penting terhadap pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia selama periode pengamatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama menggunakan data utang luar negeri atau utang negara dan pembangunan ekonomi. Maka perbedaan dengan penelitian penulis saat ini adalah Perbandingan Rasio Utang terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

## **II.8. Kerangka Pemikiran.**

Kerangka pemikiran digunakan sebagai penuntun dan untuk mencerminkan alur pemikiran dalam penelitian. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka kerangka penelitian berikut ini menggambarkan Perbandingan Rasio Utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Republik Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005-2012 dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2022.

Dapat dijelaskan bahwa variabel Rasio Utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Rasio Utang pada Masa Pemerintahan Joko Widodo, dibandingkan sehingga dapat diketahui hubungan dan perbedaannya. Kemudian hasil tersebut di analisis dengan menggunakan analisis manajemen syariah.

## **III. Metode Penelitian.**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2018: 13), metode ini didasarkan

pada pendekatan positivistik yang mengukur data penelitian dalam bentuk angka dan menggunakan statistik sebagai alat pengujian perhitungan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Marzuki (2000: 56). Penelitian ini berjudul "Analisis Manajemen Syariah Terhadap Perbandingan Rasio Utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Negara Republik Indonesia masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono". Penelitian ini dilaksanakan di Bogor karena hanya menggunakan data sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau lembaga negara. Kegiatan penelitian dilakukan pada periode Juni - Agustus 2022.

Obyek dan data penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data mengenai Utang atau Pinjaman Luar Negeri dan Produk Domestik Bruto (PDB) Negara Republik Indonesia selama periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005-2012 dan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang telah dikumpulkan oleh pihak lain melalui berbagai cara, baik secara komersial maupun non-komersial. Sumber data yang digunakan berasal dari situs resmi seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemsetneg), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program komputasi SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data dalam bentuk angka. Data kuantitatif tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Dalam penelitian ini, rumus

yang digunakan adalah *independent sample t-test* atau uji t untuk sampel independen, serta *paired sample t-test* atau uji t untuk sampel berpasangan. Sebelum melakukan uji t, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Persyaratan tersebut adalah:

1. Uji Normalitas Data.  
Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu variabel memiliki distribusi yang mengikuti pola normal atau tidak. Distribusi normal merujuk pada pola distribusi data yang sesuai dengan distribusi normal. Untuk menguji normalitas data, dapat dilakukan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dalam uji ini, jika nilai *Asymp. Sig* > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki distribusi yang bersifat normal.
2. Uji Validitas Data.  
Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian dapat mengukur variabel yang sedang diteliti. Uji validitas juga memberikan indikasi bahwa variabel yang diukur secara akurat sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Jika *r* hitung  $\geq$  *r* tabel, maka item-item pernyataan dari data adalah valid. Sebaliknya, jika *r* hitung < *r* tabel, maka item-item pernyataan dari data adalah tidak valid.
3. Uji Reliabilitas Data.  
Uji reliabilitas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan alat ukur yang menghasilkan data atau kumpulan data yang dapat diandalkan dan dipercaya. Pada penelitian ini mencari reliabilitas instrumen menggunakan *Alpha Cronbach*.

4. Uji Multikolinearitas Data.  
Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara variabel independen atau variabel bebas ketika data penelitian dimasukkan ke dalam model regresi.
5. Uji Heteroskedestisitas Data.  
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidakakuratan dalam model regresi dan persamaan regresi yang dihasilkan ketika data penelitian dimasukkan ke dalamnya.
6. Uji *Paired Sample T-Test*.  
Uji Paired T-Test adalah metode statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua set data yang berpasangan. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan rata-rata antara dua sampel yang terhubung satu sama lain. Penting untuk dicatat bahwa kedua sampel harus memiliki jumlah yang sama atau berasal dari sumber yang sama karena keterkaitan antara mereka.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

##### IV.1. Utang atau Pinjaman Luar Negeri Negara Republik Indonesia.

Pada triwulan II 2022, terjadi penurunan dalam Utang Luar Negeri Republik Indonesia. Posisi Utang Luar Negeri Republik Indonesia mencapai 403,0 miliar dolar AS pada akhir triwulan II 2022, menurun dibandingkan dengan posisi Utang Luar Negeri pada triwulan sebelumnya yang mencapai 412,6 miliar dolar AS. Tren penurunan juga terlihat pada Pinjaman Luar Negeri Pemerintah pada triwulan II 2022. Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah mencapai 187,3 miliar dolar AS, mengalami

penurunan dari posisi Utang Luar Negeri pada triwulan sebelumnya yang mencapai 196,2 miliar dolar AS. Hal ini berdasarkan laporan Bank Indonesia pada tahun 2022.

##### IV.2. Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia.

Pada triwulan II-2022, Produk Domestik Bruto (PDB) perekonomian Indonesia mencapai Rp 4 919,9 triliun berdasarkan harga saat ini, dan Rp 2 923,7 triliun berdasarkan harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 dibandingkan dengan triwulan II-2021 adalah sebesar 5,44 persen (y-on-y). Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27 persen dari sisi produksi. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,74 persen dari sisi pengeluaran. (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022).

##### IV.3. Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia.

Pada triwulan II 2022, Utang Luar Negeri Indonesia masih terjaga dengan baik, terlihat dari rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap stabil sekitar 31,8%, menurun dari rasio pada triwulan sebelumnya yang mencapai 33,8%. Selain itu, struktur Utang Luar Negeri Indonesia masih dalam kondisi yang sehat, terlihat dari dominasinya Utang Luar Negeri berjangka panjang yang mencapai 86,7% dari total Utang Luar Negeri. (Sumber: Bank Indonesia, 2022). Peran Utang Luar Negeri juga perlu dioptimalkan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. (Sumber: Bank Indonesia, 2022).

#### IV.4. Utang atau Pinjaman Luar Negeri Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia sejak awal tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, nilai Utang atau Pinjaman Luar Negeri Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, dapat terlihat di bawah ini:

Tabel IV.1.  
 Tabel Utang atau Pinjaman Luar Negeri Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012.

NOMOR	TAHUN	PEMBAGIAN BULAN DALAM SATU TAHUN	NILAI UTANG ATAU PINJAMAN LUAR NEGERI DALAM JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT
1	2005	Q1	134.362,00
2		Q2	128.355,00
3		Q3	128.759,00
4		Q4	130.652,00
5	2006	Q1	134.627,00
6		Q2	129.934,00
7		Q3	128.369,00
8	2007	Q4	128.736,00
9		Q1	131.283,00
10		Q2	133.482,00
11	2008	Q3	136.947,00
12		Q4	136.640,36
13		Q1	145.519,00
14		Q2	146.226,00
15	2009	Q3	147.339,00
16		Q4	149.141,00
17		Q1	147.982,00
18		Q2	150.043,00
19	2010	Q3	161.743,00
20		Q4	172.871,00
21		Q1	180.834,00
22		Q2	183.329,00
23	2011	Q3	195.826,00
24		Q4	202.413,00
25		Q1	210.080,00
26		Q2	222.816,00
27	2012	Q3	223.676,00
28		Q4	225.375,00
29		Q1	228.761,00
30		Q2	238.917,00
		Q3	

12		Q4	136.640,36
13	2008	Q1	145.519,00
14		Q2	146.226,00
15	2009	Q3	147.339,00
16		Q4	149.141,00
17		Q1	147.982,00
18		Q2	150.043,00
19	2010	Q3	161.743,00
20		Q4	172.871,00
21		Q1	180.834,00
22		Q2	183.329,00
23	2011	Q3	195.826,00
24		Q4	202.413,00
25		Q1	210.080,00
26		Q2	222.816,00
27	2012	Q3	223.676,00
28		Q4	225.375,00
29		Q1	228.761,00
30		Q2	238.917,00
		Q3	

Sumber: Bank Indonesia (2022), data diolah oleh penulis.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, nilai Utang atau Pinjaman Luar Negeri Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012 yang tertinggi ialah di kuartal kedua (Q2) tahun 2012 yaitu senilai 238.917,00 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan yang terendah ialah di kuartal kedua (Q2) tahun 2005 yaitu senilai 128.355,00 juta dolar Amerika Serikat.

#### IV.5. Utang atau Pinjaman Luar Negeri Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia sejak awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, maka nilai Utang atau Pinjaman Luar Negeri Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022, dapat terlihat di bawah ini.

Tabel IV.2.  
 Tabel Utang atau Pinjaman Luar Negeri Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015--2022.

NOMOR	TAHUN	PEMBAGIAN BULAN DALAM SATU TAHUN	NILAI UTANG ATAU PINJAMAN LUAR NEGERI DALAM JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT
1	2015	Q1	298.519,00
2		Q2	304.557,00
3		Q3	301.770,00
4		Q4	310.053,00
5	2016	Q1	316.785,00
6		Q2	324.787,00
7		Q3	325.261,00
8		Q4	318.751,00
9	2017	Q1	328.440,00
10		Q2	335.389,00
11		Q3	343.128,00

12		Q4	352.935,72
13	2018	Q1	359.566,13
14		Q2	356.481,94
15		Q3	359.793,63
16		Q4	375.430,21
17	2019	Q1	386.589,12
18		Q2	389.115,27
19		Q3	393.643,04
20		Q4	403.660,28
21	2020	Q1	389.009,88
22		Q2	409.034,91
23		Q3	408.524,80
24		Q4	416.935,33
25	2021	Q1	416.506,07
26		Q2	417.169,08
27		Q3	424.809,16
28		Q4	416.240,90
29	2022	Q1	412.599,91
30		Q2	403.043,72

Sumber: Bank Indonesia (2022), data diolah oleh penulis.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, nilai Utang atau Pinjaman Luar Negeri Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022 yang tertinggi ialah di kuartal ketiga (Q3) tahun 2021 yaitu senilai 424.809,16 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan yang terendah ialah di kuartal pertama (Q1) tahun 2015 yaitu senilai 298.519,00 juta dolar Amerika Serikat.

#### IV.6. Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005-2012.

Data yang dihimpun dari Bank Indonesia sejak awal tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, maka nilai Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, dapat terlihat di bawah ini.

Tabel IV.3. Tabel Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005--2012.

NOMOR	TAHUN	PEMBAGIAN BULAN DALAM SATU TAHUN	PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR PENGGUNAAN HARGA BERLAKU DALAM MILYAR RUPIAH
1	2005	Q1	637.811,50
2		Q2	666.551,20
3		Q3	708.039,00
4		Q4	736.770,60
5	2006	Q1	783.040,90
6		Q2	812.808,30
7		Q3	869.022,90
8		Q4	873.323,60
9	2007	Q1	918.879,30
10		Q2	958.597,50
11		Q3	1.023.791,70

12		Q4	1.034.863,00
13	2008	Q1	1.117.579,50
14		Q2	1.229.645,40
15		Q3	1.332.516,06
16		Q4	1.274.287,20
17	2009	Q1	1.303.528,37
18		Q2	1.375.114,15
19		Q3	1.452.502,19
20		Q4	1.446.689,00
21	2010	Q1	1.501.126,00
22		Q2	1.582.918,00
23		Q3	1.668.353,00
24		Q4	1.670.521,00
25	2011	Q1	1.742.691,00
26		Q2	1.816.090,00
27		Q3	1.923.568,00
28		Q4	1.922.392,00
29	2012	Q1	1.975.475,00
30		Q2	2.051.048,00

Sumber: Bank Indonesia (2022), data diolah oleh penulis.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, nilai Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012 yang tertinggi ialah di kuartal kedua (Q2) tahun 2012 yaitu senilai 2.051.048,00 miliar rupiah, sedangkan yang terendah ialah di kuartal pertama (Q1) tahun 2005 yaitu senilai 637.811,50 miliar rupiah



#### IV.7. Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia sejak awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, maka nilai Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015--2022, dapat terlihat di bawah ini.

Tabel IV.4. Tabel Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015--2022.

NOMOR	TAHUN	PEMBAGIAN BULAN DALAM SATU TAHUN	PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR PENGGUNAAN HARGA BERLAKU DALAM MILYAR RUPIAH
1	2015	Q1	2.728.272,00
2		Q2	2.868.867,00
3		Q3	2.998.622,00
4		Q4	2.945.029,00
5	2016	Q1	2.931.446,00
6		Q2	3.075.135,00
7		Q3	3.205.452,00
8		Q4	3.195.694,20
9	2017	Q1	3.228.034,60
10		Q2	3.366.585,80
11		Q3	3.503.568,60
12		Q4	3.490.608,30

13	2018	Q1	3.506.585,80
14		Q2	3.686.210,50
15		Q3	3.835.607,40
16		Q4	3.799.132,10
17	2019	Q1	3.783.859,30
18		Q2	3.963.861,70
19		Q3	4.067.378,00
20		Q4	4.018.844,40
21	2020	Q1	3.922.679,10
22		Q2	3.687.745,50
23		Q3	3.894.699,00
24		Q4	3.931.329,80
25	2021	Q1	3.971.159,20
26		Q2	4.176.422,50
27		Q3	4.325.162,30
28		Q4	4.498.045,20
29	2022	Q1	4.513.325,60
30		Q2	4.919.930,50

Sumber: Bank Indonesia (2022), data diolah oleh penulis.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, maka nilai Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022 yang tertinggi ialah di kuartal kedua (Q2) tahun 2022 yaitu senilai 4.919.930,50 miliar rupiah, sedangkan yang terendah ialah di kuartal pertama (Q1) tahun 2015 yaitu senilai 2.728.272,00 miliar rupiah.

**IV.8. Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012.**

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia sejak awal tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, maka nilai Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, dapat terlihat di bawah ini.

Tabel IV.5. Tabel Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005--2012.

NOMOR	TAHUN	PEMBAGIAN BULAN DALAM SATU TAHUN	RASIO UTANG ATAU PINJAMAN LUAR NEGERI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR PENGGUNAAN HARGA BERLAKU DALAM NILAI SATUAN
1	2005	Q1	0,21
2		Q2	0,19
3		Q3	0,18
4		Q4	0,18
5	2006	Q1	0,17
6		Q2	0,16
7		Q3	0,15
8		Q4	0,15
9	2007	Q1	0,14

10		Q2	0,14
11		Q3	0,13
12		Q4	0,13
13	2008	Q1	0,13
14		Q2	0,12
15		Q3	0,11
16		Q4	0,12
17	2009	Q1	0,11
18		Q2	0,11
19		Q3	0,11
20		Q4	0,12
21	2010	Q1	0,12
22		Q2	0,12
23		Q3	0,12
24		Q4	0,12
25	2011	Q1	0,12
26		Q2	0,12
27		Q3	0,12
28		Q4	0,12
29	2012	Q1	0,12
30		Q2	0,12

Sumber: Bank Indonesia (2022), data diolah oleh penulis.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, nilai Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012 yang tertinggi ialah di kuartal pertama (Q1) tahun 2005 yaitu senilai 0,21, sedangkan yang terendah ialah di kuartal ketiga (Q3) tahun 2008, kuartal pertama (Q1), kedua (Q2), dan ketiga (Q3) tahun 2009, yaitu senilai 0,11.

**IV.9. Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.**

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia sejak awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, maka nilai Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap

Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015-2022, dapat terlihat di bawah ini:

Tabel IV.6. Tabel Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015--2022.

NOMOR	TAHUN	PEMBAGIAN BULAN DALAM SATU TAHUN	RASIO UTANG ATAU PINJAMAN LUAR NEGERI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR PENGGUNAAN HARGA BERLAKU DALAM NILAI SATUAN
1	2015	Q1	0,11
2		Q2	0,11
3		Q3	0,10
4		Q4	0,11
5	2016	Q1	0,11
6		Q2	0,11
7		Q3	0,10
8		Q4	0,10
9	2017	Q1	0,10
10		Q2	0,10
11		Q3	0,10
12		Q4	0,10
13	2018	Q1	0,10
14		Q2	0,10
15		Q3	0,09
16		Q4	0,10
17	2019	Q1	0,10

18		Q2	0,10
19		Q3	0,10
20		Q4	0,10
21	2020	Q1	0,10
22		Q2	0,11
23		Q3	0,10
24		Q4	0,11
25	2021	Q1	0,10
26		Q2	0,10
27		Q3	0,10
28		Q4	0,09
29	2022	Q1	0,09
30		Q2	0,08

Sumber: Bank Indonesia (2022), data diolah oleh penulis.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, maka nilai Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022 yang tertinggi ialah di kuartal pertama (Q1), kedua (Q2), dan keempat (Q4) tahun 2015, kuartal pertama (Q1), dan kedua (Q2) tahun 2016, kuartal kedua (Q2), dan keempat (Q4) tahun 2020, yaitu senilai 0,11, sedangkan yang terendah ialah kuartal ketiga (Q3) tahun 2008, kuartal kedua (Q2) tahun 2022, yaitu senilai 0,08.

#### IV.10. Uji Normalitas Data.

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan melalui program SPSS (*Statistical Program for Social Sciences*) versi 26, maka didapatkan tabel sebagai berikut:

Tabel IV.7. Tabel Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
	Mean	.0000000

Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	.58109120
Most Extreme Differences	Absolute	.177
	Positive	.167
	Negative	-.177
Test Statistic		.177
Asymp. Sig. (2-tailed)		.018 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari hasil uji normalitas di atas, maka diketahui nilai signifikansi  $0,18 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

#### IV.11. Uji Validitas Data.

Untuk menghitung nilai r-tabel, penelitian ini menggunakan nilai N sebanyak 30 data dan tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan tabel distribusi nilai r, diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,361.

Tabel IV.8. Tabel Distribusi Nilai r Tabel pada Signifikansi 5%

N	The Level of Significance	N	The Level of Significance
	5%		5%
3	0.997	38	0.320
4	0.950	39	0.316
5	0.878	40	0.312
6	0.811	41	0.308
7	0.754	42	0.304
8	0.707	43	0.301
9	0.666	44	0.297
10	0.632	45	0.294
11	0.602	46	0.291
12	0.576	47	0.288
13	0.553	48	0.284
14	0.532	49	0.281
15	0.514	50	0.279
16	0.497	55	0.266

17	0.482	60	0.254
18	0.468	65	0.244
19	0.456	70	0.235
20	0.444	75	0.227
21	0.433	80	0.220
22	0.432	85	0.213
23	0.413	90	0.207
24	0.404	95	0.202
25	0.396	100	0.195
26	0.388	125	0.176
27	0.381	150	0.159
28	0.374	175	0.148
29	0.367	200	0.138
30	0.361	300	0.113
31	0.355	400	0.098
32	0.349	500	0.088
33	0.344	600	0.080
34	0.339	700	0.074
35	0.334	800	0.070
36	0.329	900	0.065
37	0.325	1000	0.062

Tabel IV.9. Tabel Uji Validitas.

Correlations			
		RPLNP DB2	RPLNP DB1
Pearson Correlation	RPLNP DB2	1.000	.542
	RPLNP DB1	.542	1.000
Sig. (1-tailed)	RPLNP DB2	.	.001
	RPLNP DB1	.001	.
N	RPLNP DB2	30	30
	RPLNP DB1	30	30

Berdasarkan uji validitas di atas, maka diketahui nilai r hitung sebesar 0,542, dan ini berarti nilai r hitung lebih besar dibandingkan nilai r tabel, atau  $0,542 > 0,361$ , maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian adalah valid.

#### IV.12. Uji Reliabilitas Data.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan melalui program SPSS versi 26, maka didapatkan tabel sebagai berikut:

Tabel IV.10. Tabel Uji Reliabilitas.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.418	2

Berdasarkan uji reliabilitas di atas, maka diketahui nilai  $r$  hitung sebesar 0,418, dan diketahui bahwa nilai  $r$  hitung lebih besar dibandingkan nilai  $r$  tabel, atau  $0,418 > 0,361$ , maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian adalah reliabel.

#### IV.13. Uji Multikolinieritas.

Berdasarkan uji multikolinieritas yang dilakukan melalui program SPSS versi 26, maka didapatkan tabel sebagai berikut:

Tabel IV.11. Tabel Uji Multikolinieritas.

Coefficients <sup>a</sup>														
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	8.161	.569		14.351	.000	6.996	9.326						
	RPLNPDB1	.141	.041	.542	3.413	.002	.056	.225	.542	.542	.542	1.000	1.000	

a. Dependent Variable: RPLNPDB2

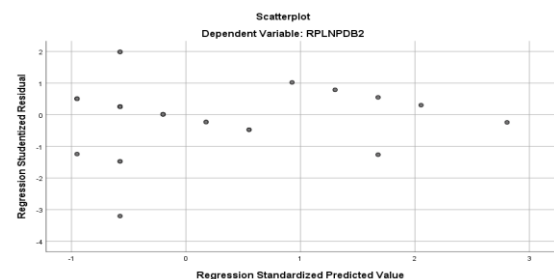
Berdasarkan uji multikolinieritas di atas, maka diketahui nilai *Tolerance* sebesar 1,000, dan ini berarti nilai *Tolerance* lebih besar dibandingkan nilai 0,100, atau  $1,000 > 0,100$ , maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian adalah tidak terjadi multikolinieritas. Kemudian didapatkan

nilai VIF sebesar 1,000, dan ini berarti nilai VIF lebih kecil dibandingkan nilai 10,000, atau  $1,000 < 10,000$ , maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian adalah tidak terjadi multikolinieritas.

#### IV.14. Uji Heteroskedastisitas.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas yang dilakukan melalui program SPSS versi 26, maka didapatkan gambar sebagai berikut:

Gambar IV.1. Gambar Uji Heteroskedastisitas.



Dalam pendapat Imam Ghazali (2011: 139) data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas, Hal ini karena tidak terdapat pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta penyebaran titik-titik pada sumbu Y di atas dan di bawah angka 0. Jadi, kesimpulannya tidak ada gejala heteroskedastisitas.

#### IV.15. Uji Paired Sample T-Test.

Dalam uji normalitas di atas, telah diketahui bahwa data penelitian ini mempunyai distribusi normal. Uji *Paired Sample T-Test* ini terdiri dari:

1. Uji *Paired Samples Statistics*.
2. Uji *Paired Samples Correlations*.
3. Uji *Paired Samples Test*.

Tabel IV.12. Tabel *Paired Samples Statistics*.

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Paired	RPL	13.	30	2.6617	.48597
	NPD	533			
	B1	3			
	RPL	10.	30	.69149	.12625
NPD	066				
	B2	7			

Berdasarkan Tabel *Paired Samples Statistics* di atas, diperlihatkan statistik deskriptif dari kedua data penelitian atau sampel berpasangan tersebut. Nilai rata-rata dari RPLNDB1 ialah 13,5333, sedangkan nilai rata-rata dari RPLNDB2 ialah 10.0667. maka dapat terjawab hipotesis tersebut bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Tabel IV.13. Tabel *Paired Samples Correlations*.

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Paired	RPLNPDB1 & RPLNPDB2	30	.542	.002

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka diperlihatkan statistik hubungan antara kedua data penelitian atau sampel berpasangan tersebut. Nilai Signifikansi dalam tabel tersebut di atas ialah 0.002 dan ini berarti  $0,002 < 0,05$ , yang mana nilai 0,05 didapatkan dari uji 2 sisi dengan pada taraf signifikansi 0,05 pada bagian di atas.

maka dapat terjawab hipotesis tersebut bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan kalimat lain ialah bahwa terdapat hubungan antara Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Tahun 2005—2012, dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

Dengan melihat hasil tabel di atas, maka terlihat nilai rata-rata yang lebih tinggi dalam hal Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, berhubungan dengan nilai rata-rata rasio tersebut dalam Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

Tabel IV.14. Tabel *Paired Samples Test*.

Paired Samples Test									
		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	RPLNPDB1 - RPLNPDB2	3.46667	2.35962	.43081	2.58557	4.34776	8.047	29	.000

Berdasarkan Tabel *Paired Samples Test* tersebut, maka diperlihatkan statistik perbedaan antara kedua data penelitian atau sampel berpasangan tersebut. Nilai Signifikansi dalam tabel tersebut di atas ialah 0.000 dan ini berarti  $0,000 < 0,05$ , yang mana nilai 0,05 didapatkan dari uji 2 sisi dengan taraf signifikansi 0,05 pada bagian di atas. Dasar pengambilan keputusan dalam tabel tersebut di atas ialah:

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 0.05, atau  $> 0,05$ , maka kedua data penelitian atau sampel berpasangan tersebut, tidak terdapat perbedaan.
2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 0.05, atau  $< 0,05$ , maka kedua data penelitian atau sampel

berpasangan tersebut, terdapat perbedaan.

#### **IV.16. Analisis Manajemen Syariah terhadap Hasil Perbandingan Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009—2012 dan Joko Widodo Tahun 2019—2022.**

Berdasarkan pengolahan data dan analisis tersebut di atas, maka terlihat bahwa sejak Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2009—2012, atau bahkan sejak Indonesia merdeka menjadi Republik Indonesia, selalu saja ada utang atau pinjaman luar negeri yang terus dilakukan, bahkan sampai dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022 ini. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Negara Republik Indonesia.

Adapun dalam lingkup manajemen syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan utang atau pinjaman luar negeri, ialah:

1. Utang atau pinjaman luar negeri merupakan alternatif terakhir ketika negara sudah mengalami kesulitan dengan segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai, serta mengalami kebuntuan. Namun karena keterbatasan negara sendiri yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang atau pinjaman luar negeri. Jika negara terpaksa berutang atau melakukan pinjaman luar negeri, maka jangan di luar kemampuan.
2. Jika negara telah melakukan utang atau pinjaman luar negeri, maka negara harus berniat dan berusaha kuat untuk membayarnya. Negara wajib memiliki komitmen untuk

mengembalikan utang (Sukri Iska, 2012: 179). Secara prinsip, memperlambat dalam membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, dan jika negara memperlambat membayar utang atau pinjaman luar negeri tanpa ada alasan yang benar, maka negara telah melakukan kezaliman. Dalam konteks mikro, sesuai hukum perdata internasional, maka penerapan prinsip ini dilakukan dengan, misalnya, melakukan penyitaan aset, atau ditambah dengan hukuman denda.

Bagi negara Republik Indonesia yang terpaksa berutang karena suatu hal, maka hendaklah memperhatikan utang, jangan sampai utang dijadikan faktor utama yang dapat menyengsarakan bangsa dari negara Republik Indonesia di dunia dan akhirat, dan tentunya menjadi tidak Bahagia dan bahkan menjadi permasalahan yang tidak selesai-selasai.

#### **V. SIMPULAN.**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai rata-rata Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata rasio tersebut dalam Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.
2. Terdapat hubungan antara Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, dengan Masa Pemerintahan Joko

Widodo Tahun 2015—2022. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dalam hal Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, berhubungan dengan nilai rata-rata rasio tersebut dalam Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.

3. Terdapat perbedaan antara Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, dengan Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dalam hal Rasio Utang atau Pinjaman Luar Negeri terhadap Produk Domestik Bruto Negara Republik Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2005—2012, berbeda dengan nilai rata-rata rasio tersebut dalam Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015—2022.
4. Terdapat prinsip-prinsip utang atau pinjaman luar negeri yang harus diperhatikan, ialah:
  - a. Utang atau pinjaman luar negeri merupakan alternatif terakhir ketika negara sudah mengalami kesulitan dengan segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai, serta mengalami kebuntuan. Terdapat aspek keterpaksaan yang terkait dengan negara, bukan sebagai kebiasaan untuk berutang atau mengambil pinjaman luar negeri. Hal ini menggambarkan semangat

untuk membangun kemandirian negara dan berupaya maksimal dalam mengoptimalkan potensi yang ada dalam negara. Namun karena keterbatasan negara sendiri yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang atau pinjaman luar negeri.

- b. Jika negara terpaksa berutang atau melakukan pinjaman luar negeri, maka negara jangan di luar kemampuan. Dalam konteks syariah, istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi ini adalah "*ghalabatid dayn*" yang berarti terbelit utang atau pinjaman luar negeri. Keadaan ini dapat menghasilkan efek yang signifikan, yaitu "*gharir rijal*" yang berarti mudah dikendalikan oleh pihak lain. Karena itu, Nabi Muhammad Sholallahu 'Alaihi wa Salam selalu berdoa agarsenantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri atau *izzah* menjadi hilang (Nurul Huda, 2012: 260-261).
- c. Jika negara telah melakukan utang atau pinjaman luar negeri, maka negara harus berniat dan berusaha kuat untuk membayarnya. Negara wajib memiliki komitmen untuk mengembalikan utang (Sukri Iska, 2012: 179). Secara prinsip, maka memperlambat membayar utang bagi yang mampu



merupakan sebuah kezaliman, dan jika negara memperlambat membayar utang atau pinjaman luar negeri tanpa ada alasan yang benar, maka negara telah melakukan kezaliman. Dalam konteks mikro, sesuai hukum perdata internasional, maka penerapan prinsip ini dilakukan dengan, misalnya, melakukan penyitaan aset, atau ditambah dengan hukuman denda.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan ialah:

1. Semua aktifitas perekonomian negara, hendaklah dilakukan secara sungguh-sungguh, agar tugas dan fungsi negara yang dilakukan melalui pemimpinya, mendapatkan nilai yang sempurna di dunia dan akhirat. Dalam kegiatan perekonomian negara, sudah seharusnya negara menekankan bahwa utang adalah sebagai metode terakhir dalam meraih nilai dan jika terdapat keterpaksaan.
2. Bagi Republik Indonesia yang terpaksa mengambil utang dalam situasi tertentu, haruslah mempertimbangkan dengan hati-hati agar utang tersebut tidak menjadi faktor utama yang menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia, baik di dunia maupun di akhirat, dan tentunya menjadi tidak Bahagia dan bahkan menjadi permasalahan yang tidak selesai-selasai.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Presiden Republik Indonesia. (2022). Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 16 Agustus 2022. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). Statistik Ekonomi dan Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia. (2022). Statistik Utang Republik Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022. Statistik Pertumbuhan Ekonomi Republik Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Nota Keuangan Pidato Presiden Republik Indonesia di Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 16 Agustus 2022. Jakarta: Bank Indonesia.
- Iqbal, Hasan. (2006). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik..*
- Harahap. (2007). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia.*
- Arief, S. Dan Sasono A. (1987). *Modal asing, beban hutang luar negeri dan ekonomi indonesia.* Jakarta: DI Press.
- Hernatasa. (2004). *Analisis Utang Luar Negeri Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.* Bogor: Tesis SPS-IPB.
- Priyatno Duwi. (2012). *Belajar cepat olah data statistik dengan SPSS.* Yogyakarta: Andi.

- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Saputra, R.D. dan Wibowo, D.M. (2001). *Perkembangan pinjaman luar negeri Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Atmadja, Adwin Surya,. (2000). *Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya*. Jakarta: UKP.
- Jhin M.L (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Malik, A., dan Kusuma, D. (2014). Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, (Online), Vol.3, No.2, January 2017 (<http://e-jurnal.ipmunsera.org>). Di akses 5 Februari 2017).
- Sukarna, W dan Mamun S. (2005). Dilema Utang Luar Negeri Indonesia dalam Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 13(2), Desember: 89-120.
- Word Bank. (2017/2018). *World debt table*. Diakses dari <https://data.worldbank.org/country/-/indonesia tanggal 25 Juli 2018 jam 15.45>.
- Febrina Rizki Syaharani. (2011). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 1985-2009.
- Syukri Iska.(2012: 179) . *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*.
- Huda Nurul. (2012 : 260-261). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Strategi Pembangunan Indonesia: Pendekatan Harrod-Domar*.